



## PRAGMATISME POLITIK DALAM PEMILU LEGISLATIF TAHUN 2024 DI KABUPATEN LAMONGAN

Satryo Pringgo Sejati<sup>1)</sup>, Ahmad Burhan Hakim<sup>2)</sup>

<sup>1)</sup>Universitas Papua, Indonesia

<sup>2)</sup>Institut Pesantren Sunan Drajat, Indonesia

Email: [s.sejati@unipa.ac.id](mailto:s.sejati@unipa.ac.id)<sup>1)</sup>, [burhanhakim@insud.ac.id](mailto:burhanhakim@insud.ac.id)<sup>2)</sup>,

**Abstrak:** Pragmatisme politik dan demokrasi di Indonesia terjadi begitu massif, dan hal ini juga terjadi di daerah tak terkecuali di Kabupaten Lamongan. Biaya politik tinggi menjadi salah satu faktor signifikan terhadap terjadinya politik pragmatis tersebut. Sehingga hal tersebut sulit kiranya untuk dihindarkan atau bahkan dihilangkan. Metode penelitian dalam tulisan sederhana ini yakni metode penelitian kualitatif dengan menggunakan studi Pustaka dan wawancara untuk mendapatkan data yang dibutuhkan baik data primer maupun sekunder. Kabupaten Lamongan adalah kabupaten yang terkenal dengan sebutan Kota Santri atau Kota Wali, dari situlah kemudian Kabupaten tersebut menaik untuk dilakukan penelitian. Demokrasi liberal yang sedang berkembang di Indonesia menciptakan fakta-fakta sosial baru dalam masyarakat. Fakta tersebut yakni adanya praktik politik pragmatis dan politik transaksional yang menyebabkan terjadinya politik biaya tinggi yang luar biasa, maka demokrasi Indonesia hari ini tidak bisa dilepaskan dengan fakta tersebut. Terlebih masyarakat juga punya pemikiran yang cukup pragmatis dan transaksional ketika pemilu tiba. Sehingga hal tersebut tidak terjadi pada ruangan hampa, namun secara factual terjadi begitu massif yang seolah menjadi rahasia umum bagi masyarakat dan petinggi politik itu sendiri.

**Kata Kunci:** *Politik, Demokrasi, Politik Biaya Tinggi*

**Abstract:** Political pragmatism and democracy in Indonesia are so massive, and this also happens in the regions, including Lamongan Regency. High political costs are one of the significant factors in the occurrence of pragmatic politics. So it is difficult to avoid or even eliminate. The research method in this simple article is a qualitative research method using library studies and interviews to obtain the required data, both primary and secondary data. Lamongan Regency is a regency known as the City of Santri or the City of Wali, from there the Regency rose to be researched. Liberal democracy that is developing in Indonesia creates new social facts in society. These facts are the existence of pragmatic political practices and transactional politics that cause extraordinary high-cost politics, so today's Indonesian democracy cannot be separated from these facts. Moreover, society also has quite pragmatic and transactional thinking when the election arrives. So that this does not happen in a vacuum, but in fact it happens so massively that it seems to be an open secret for society and political leaders themselves.

**Keywords:** *Politics, Democracy, High Cost Politics*

### A. Pendahuluan

Politik adalah salah satu media yang bisa digunakan untuk memperjuangkan banyak hal, terutama perjuangan yang berkaitan dengan suara atau aspirasi rakyat. Politik mempunyai posisi penting dalam sistem negara sehingga menjadi penting apabila politik suatu negara harus dapa dijaga baik secara sistem maupun alat kelengkapannya. Indonesia adalah salah satu negara demokratis di dunia, dengan menggunakan cara pemilihan

umum secara langsung maka sebutan sebagai negara demokrasi barang tentu bisa disematkan di Indonesia.<sup>1</sup> Dalam pelaksanaan pemilu langsung sejak tahun 2004 lalu, maka Indonesia sudah melakuakn kurang lebih 20 tahun lamanya, hal ini tentu akan memunculkan persoalan baik secara positif dan negatif. Secara sederhana politik dan demokrasi di Indonesia memunculkan ide dan gagasan dari banyak kalangan masyarakat, sehingga siapapun dengan latar belakang apapun bisa mencalonkan diri sebagai pemimpin,<sup>2</sup> atau calon anggota legislatif tentu dengan syarat administrasi yang telah ditentukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Dengan kata bahwa akses politik dibuka secara lebar dan transparan<sup>3</sup>.

Namun ada suatu fakta yang kemudian perlu untuk dikaji ulang dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia khususnya di Kabupaten Lamongan. Terjadinya pemilu langsung ternyata di barengi dengan adanya politik pragmatis bahkan terjadi pula praktik politik transaksional yang begitu massif.<sup>4</sup> Yang terjadi di Kabupaten Lamongan bisa jadi terjadi di Kabupaten lainya di Indonesia. Karena menggunakan sistem yang sama dari pusat sampai daerah. Penulis melakukan sedikit observasi dan penelitian sederhana, bahwa caleg yang mampu lolos untuk mendapatkan satu kursi di Dapilnya masing-masing membutuhkan dana teknis kurang lebih 1,5 milyar – 3 milyar rupiah.<sup>5</sup> Bahkan ada caleg yang mengabdikan uang kurang lebih 3 milyar rupiah tidak mampu untuk mendapatkan satu kursi di dapilnya. Fakta semacam ini tentu bisa diadikans sebuah tesis bahwa politik dan demokrasi di Indonesia membutuhkan biaya yang mahal. Sehingga mereka yang lolos untuk bisa mendapatkan satu kursi adalah mereka yang punya modal besar dan tidak dalam kategori masyarakat miskin.<sup>6</sup>

Ada dinamika baru dalam demokrasi di Indonesia khususnya di Kabupaten Lamongan, bahwa memang benar demokrasi adalah keterbukaan dan perwakilan. Semua bisa menjadi calon dengan berbagai macam latar belakang, namun kompetisi yang terjadi adalah hanya mereka yang punya modal besar yang mampu memenangkan pertarungan. Dengan kondisi semacam ini maka akan sulit agaknya apabila Indonesia bisa lepas dari kasus korupsi, biaya politik yang malah menjadi salah satu faktor signifikan sehingga hal tersebut sulit kiranya untuk dihilangkan. Belum lagi sikap dari masyarakat yang cenderung punya prilaku pragmatis apabila menghadapi momen pemilu. Hal seperti dua sisi mata uang yang saling menempel tak tidak mudah untuk dipisahkan dan diurai. Perlu kiranya ada pendidikan politik yang memang ditujukan untuk masyarakat sehingga mereka tidak dengan mudah mau menerima uang yang beredar dalam masa pemilu. Memang fakta-fakta tersebut penulis temukan tidak hanya pada peserta pemilu, namun masyarakat yang menyumbangkan suaranya pun tidak ketinggalan untuk melakukan tindakan pragmatis tersebut. Belum lagi ada beberapa dukungan dari pondok pesantren yang secara implisit mendukung salah satu calon, hal tersebut bagi penulis menjadi wajar adanya ditengah deras arus demokratisasi yang sedang kita alami bersama. Namun secara faktual kita bisa memberikan sedkiti analisis sederhana bahwa demokrasi liberal yang sedang berjalan di Indonesia ternyata menimbulkan dampak lainya yang terjadinya politik pragmatis bahkan politik transaksional tak terkecuali di wilayah Kabupaten Lamongan.

## B. Metode

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan sosial dan politik. Penulis juga menggunakan Teknik pengumpulan data berupa *library research* atau

<sup>1</sup> Aw, M. J. (2015). Peranan Partai Politik Dalam Demokrasi di Indonesia. *Jurnal Administrasi Publik*, 6(2).

<sup>2</sup> Budiman, B. N., Putriga, B. R., Safitri, B. D., & Imanuela, V. J. (2022). Populisme: konsekuensi dari stagnasi politik dan demokrasi di Indonesia. *Jurnal PolGov Vol*, 4(1).

<sup>3</sup> Ibid

<sup>4</sup> Hakim, A. B., & Sejati, S. P. (2024). POLITIK PEMBANGUNAN DALAM LOGIKA DEMOKRASI REPRESENTATIF:(Studi Kasus Pembangunan di Kabupaten Lamongan). *The Republic: Journal of Constitutional Law*, 2(1), 14-22.

<sup>5</sup> Hasil Wawancara dengan Sejumlah Caleg dan Petinggi Partai di Kabupaten Lamongan, Dilakukan pada 20/11/2024.

<sup>6</sup> Hasil Wawancara dengan Sejumlah Tokoh Masyarakat dan Pemuda di Kabupaten Lamongan, Dilakukan pada 21/11/2024

disebut juga studi Pustaka. Untuk menambah data primer penulis juga menggunakan Teknik wawancara dan observasi supaya bisa bertemu langsung dengan objek penelitian. Dengan demikian penelitian sederhana ini mampu sedikit mengungkap dinamika bahkan perkembangan demokrasi di Indonesia khususnya di wilayah Kabupaten Lamongan. Pemilihan wilayah tersebut tak lepas dari fakta bahwa Kabupaten Lamongan memang kota atau daerah penyangga bagi Ibu Kota Provinsi Jawa Timur yakni Surabaya. Disisi lain Kabupaten Lamongan terkenal juga sebagai Kota Santri atau bahkan Kota Wali.

### C. Temuan Data dan Diskusi

#### 1. Pragmatisme Politik dalam Pemilu

Sistem politik pragmatis sering kali memengaruhi cara para kandidat dan partai berinteraksi dengan pemilih, di mana dukungan dapat dibeli atau ditukar dengan imbalan tertentu. Praktik ini dapat mengarah pada korupsi dan merusak integritas proses demokrasi, karena keputusan pemilih sering kali didasarkan pada keuntungan pribadi daripada visi atau program yang lebih luas.<sup>7</sup> Hal ini menciptakan tantangan besar bagi demokrasi, karena pemilih mungkin merasa terpaksa untuk memilih berdasarkan imbalan materi daripada keyakinan ideologis atau program yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Dalam konteks ini, penting untuk meningkatkan kesadaran publik tentang dampak negatif dari politik transaksional dan mendorong partisipasi aktif dalam proses demokrasi yang lebih transparan dan akuntabel. Masyarakat perlu didorong untuk mengevaluasi calon dan partai berdasarkan rekam jejak mereka serta komitmen terhadap kebijakan yang berkelanjutan, bukan hanya pada imbalan instan yang ditawarkan. Dengan demikian, pendidikan politik yang baik dan akses informasi yang memadai akan menjadi kunci untuk membangun pemilih yang cerdas dan kritis, mampu membuat keputusan berdasarkan nilai-nilai demokrasi yang sejati.<sup>8</sup>

Peningkatan literasi politik di kalangan masyarakat juga akan membantu menciptakan budaya diskusi yang sehat, di mana isu-isu penting dapat dibahas secara terbuka dan konstruktif. Penting juga untuk melibatkan generasi muda dalam proses ini, agar mereka dapat menjadi agen perubahan yang aktif dan berkontribusi pada masa depan demokrasi yang lebih baik. Dengan melibatkan mereka dalam forum-forum diskusi dan pelatihan,<sup>9</sup> generasi muda dapat mengembangkan pemahaman yang lebih mendalam tentang tanggung jawab sebagai warga negara serta tantangan yang dihadapi oleh masyarakat. Dengan demikian, pendidikan politik yang inklusif dan partisipatif akan memperkuat komitmen masyarakat terhadap nilai-nilai demokrasi serta mendorong keterlibatan aktif dalam proses pengambilan keputusan. Pendidikan semacam ini tidak hanya meningkatkan kesadaran politik, tetapi juga membangun rasa memiliki dan tanggung jawab kolektif di antara warga negara, yang pada gilirannya dapat memperkuat struktur demokrasi itu sendiri.<sup>10</sup>

Dengan meningkatkan akses terhadap informasi dan sumber daya yang relevan, generasi muda akan lebih siap untuk menghadapi tantangan global serta berperan aktif dalam menciptakan perubahan positif di masyarakat. Dengan demikian, mereka akan mampu berkontribusi dalam merumuskan kebijakan yang lebih responsif dan inklusif, serta menciptakan lingkungan yang mendukung dialog konstruktif di antara berbagai kelompok masyarakat. Pentingnya kolaborasi antara pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat sipil dalam menciptakan ekosistem yang mendukung partisipasi ini tidak dapat diabaikan.<sup>11</sup>

Namun, pendidikan politik yang inklusif dan partisipatif juga dapat menimbulkan tantangan dan risiko tertentu. Terkadang, pendekatan ini dapat menyebabkan polarisasi di antara kelompok-kelompok

<sup>7</sup> Ekowati, E. Y. (2019). Pragmatisme Politik: Antara Koalisi, Pencalonan, dan Calon Tunggal Dalam Pilkada. *Jurnal Transformative*, 5(1), 16-37.

<sup>8</sup> Noor, F. (2016). Perilaku politik pragmatis dalam Kehidupan politik Kontemporer: Kajian atas menyurutnya peran ideologi politik di Era reformasi. *Masyarakat Indonesia*, 40(1), 57-74.

<sup>9</sup> Darmawan, I. (2015). Keterlibatan selebriti dalam pemilu Indonesia pasca Orde Baru. *Sosiobumaniora*, 17(3), 230-236.

<sup>10</sup> Syamsuadi, A., Zamhasari, Z., Hartati, S., & Trisnawati, L. (2020). Pragmatisme Partai Islam: Strategi Politik Terbuka Partai Keadilan Sejahtera dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau Tahun 2018. *JISPO Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 10(1), 1-22.

<sup>11</sup> Azwar, A. (2014). Kiai, Money Politik dan Pragmatisme Politik dalam Perspektif Siyash Syar'iyah: Studi Kasus Pilkadaes Plosorejo Tahun 2013. *IN RIGHT: Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia*, 5(2).

masyarakat, di mana individu lebih cenderung terjebak dalam pandangan ekstrem dan mengabaikan dialog yang konstruktif. Selain itu, peningkatan kesadaran politik tidak selalu diiringi dengan pemahaman yang mendalam tentang kompleksitas isu-isu yang ada, yang dapat berujung pada keputusan yang tidak bijaksana atau reaksi emosional yang berlebihan.<sup>12</sup>

Di samping itu, meskipun akses terhadap informasi dan sumber daya penting, tidak semua informasi yang tersedia bersifat akurat atau tidak bias. Generasi muda mungkin terpengaruh oleh berita palsu atau propaganda yang dapat mengarah pada pembentukan opini yang salah. Lebih jauh lagi, kolaborasi antara pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat sipil sering kali terhambat oleh kepentingan politik dan konflik yang ada, yang dapat mengurangi efektivitas inisiatif pendidikan politik. Dalam beberapa kasus, partisipasi masyarakat justru menjadi alat bagi pihak tertentu untuk mencapai agenda pribadi, bukan untuk kepentingan bersama. Oleh karena itu, perlu diingat bahwa meskipun pendidikan politik memiliki potensi positif, ada risiko yang perlu dikelola agar tidak mengganggu stabilitas sosial dan politik.<sup>13</sup>

## 2. Politik Biaya Tinggi dan Terjadinya Politik Transaksional di Kabupaten Lamongan

Politik berbiaya tinggi sering mengarah pada tantangan yang signifikan dalam tata kelola, karena dapat menciptakan hambatan untuk partisipasi dan perwakilan di antara berbagai kelompok sosial ekonomi. Politik berbiaya tinggi dapat memperburuk ketidaksetaraan, membatasi kemampuan komunitas yang terpinggirkan untuk mempengaruhi proses pengambilan keputusan dan mengakses sumber daya penting.<sup>14</sup> Ketidakadilan ini menciptakan siklus di mana suara mereka yang kurang beruntung semakin terpinggirkan, sehingga menghambat kemajuan sosial dan ekonomi yang inklusif. Sistem politik yang tidak adil ini juga dapat menyebabkan meningkatnya ketidakpuasan dan apatis di kalangan masyarakat, mengurangi kepercayaan terhadap lembaga pemerintah dan memperburuk polarisasi sosial. Salah satu solusi untuk mengatasi masalah ini adalah dengan menerapkan reformasi yang mempromosikan transparansi dan akuntabilitas dalam pendanaan politik, sehingga semua kelompok masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam proses demokratis. Reformasi ini dapat mencakup pengaturan yang lebih ketat terhadap sumbangan kampanye, serta peningkatan akses informasi bagi publik mengenai sumber dan penggunaan dana politik. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan akan tercipta lingkungan politik yang lebih adil dan inklusif, di mana suara semua lapisan masyarakat dapat didengar dan diperhitungkan dalam pengambilan keputusan.<sup>15</sup>

Penting juga untuk melibatkan masyarakat dalam proses reformasi tersebut, sehingga mereka merasa memiliki peran aktif dalam menciptakan perubahan yang diinginkan dan mendorong keterlibatan yang lebih besar dalam demokrasi. Langkah-langkah ini tidak hanya akan memperkuat kepercayaan publik terhadap sistem politik, tetapi juga mendorong partisipasi yang lebih luas dari berbagai kelompok masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan. Dengan demikian, upaya untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam politik akan menjadi kunci untuk membangun kepercayaan antara pemerintah dan masyarakat, serta memastikan bahwa keputusan yang diambil mencerminkan kepentingan bersama.<sup>16</sup>

Politik transaksional sering kali muncul sebagai respons terhadap tingginya biaya politik, di mana para aktor politik terpaksa melakukan negosiasi dan kompromi untuk mencapai tujuan mereka. Hal ini menciptakan dinamika di mana kepentingan individu atau

<sup>12</sup> Munzir, A. A. (2019). Beragam peran media sosial dalam dunia politik di Indonesia. *JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA (Journal of Governance and Political Social UMA)*, 7(2), 173-182.

<sup>13</sup> Windharti, R., Nurhandjanti, N., & Agung, K. (2021). Pragmatisme Dalam Kandidasi Calon Anggota DPR Partai Nasdem Pada Pemilu 2019. *Journal Publicubo*, 4(2), 738-756.

<sup>14</sup> Jati, W. R. (2022). Perilaku Memilih Rasional dalam Pemilu Indonesia Kontemporer: Perbandingan Pemilu 2014 dan Pemilu 2019. *Jurnal Adhyasta Pemilu*, 5(2), 70-84.

<sup>15</sup> Fakhruzy, A. (2020). Mendobrak Kedaulatan Rakyat dalam Sandera Partai Politik. *Jurnal Politikom Indonesiana*, 5(1), 25-36.

<sup>16</sup> Sumartono, S. (2018). Budaya Politik Dalam Masyarakat Pragmatis. *LUGAS Jurnal Komunikasi*, 2(1), 20-26.

kelompok sering kali lebih diutamakan dibandingkan dengan kepentingan publik, sehingga mengarah pada praktik-praktik yang tidak transparan dan korupsi. Taktik ini sering kali mengakibatkan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap institusi politik, yang pada gilirannya dapat memperburuk legitimasi pemerintah dan memperdalam krisis dalam sistem demokrasi. Dalam konteks ini, penting untuk mengevaluasi mekanisme yang dapat memperkuat akuntabilitas dan transparansi dalam proses politik agar kepentingan publik tetap terjaga.<sup>17</sup>

Membangun sistem yang lebih inklusif dan partisipatif menjadi langkah krusial untuk mengurangi pengaruh politik transaksional, sehingga masyarakat dapat berperan aktif dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka. Dengan melibatkan berbagai lapisan masyarakat dalam proses politik, diharapkan akan tercipta ruang dialog yang konstruktif dan kolaboratif, sehingga kebijakan yang dihasilkan lebih responsif terhadap kebutuhan publik. Pentingnya pendidikan politik juga tidak dapat diabaikan, karena meningkatkan kesadaran masyarakat akan hak dan tanggung jawab mereka dalam sistem demokrasi merupakan kunci untuk mendorong partisipasi yang lebih aktif dan informatif. Selain itu, penyediaan akses informasi yang transparan dan mudah dipahami akan membantu masyarakat untuk lebih memahami proses politik serta mendorong mereka untuk terlibat dalam diskusi dan pengambilan keputusan. Dengan demikian, upaya membangun budaya politik yang inklusif dan partisipatif menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa suara masyarakat didengar dan diperhitungkan dalam setiap kebijakan yang diambil.<sup>18</sup>

Ruang dialog yang terbuka dan inklusif tidak hanya akan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah, tetapi juga menciptakan sinergi antara pemangku kepentingan dalam merumuskan solusi yang berkelanjutan bagi tantangan yang dihadapi.<sup>19</sup> Pentingnya pendidikan politik yang memadai juga tidak dapat diabaikan, karena hal ini akan membekali masyarakat dengan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk berpartisipasi secara efektif dalam proses demokrasi. Dengan demikian, program-program pendidikan yang dirancang untuk meningkatkan kesadaran politik dan keterampilan kritis harus menjadi prioritas dalam agenda pembangunan masyarakat.<sup>20</sup>

Di Kabupaten Lamongan juga terjadi politik biaya tinggi, dimana politik tersebut akhirnya menyebabkan terjadinya politik transaksional atau bahkan politik uang. Hal tersebut tentu sulit dihindari dan menjadi fakta sosial yang cukup mengkhawatirkan. Karena modal besar juga harus disiapkan oleh para caleg untuk bisa memenangkan satu kursi. Dengan adanya fakta tersebut mendeskripsikan bahwa memang politik memerlukan biaya yang tinggi, terjadinya transaksi tersebut tidak bisa kita hanya menyalahkan caleg semata, namun pola pikir dari masyarakat juga perlu diadakan koreksi. Yang mana ternyata masyarakat juga menginginkan hal tersebut, sehingga terjadinya politik biaya tinggi sulit untuk dihindari atau bahkan dihilangkan.<sup>21</sup>

<sup>17</sup> Masrur, M., Purnomo, F., Arviana, S., & Wono, H. Y. (2022). Pragmatisme Partai Nasional Demokrat dalam Sistem Pemilu Terbuka. *JCommsci-Journal Of Media and Communication Science*, 5(1), 41-53.

<sup>18</sup> Lukmajati, D. (2016). Praktek Politik Uang Dalam Pemilu Legislatif 2014 (Studi Kasus di Kabupaten Blora). *Politika: Jurnal Ilmu Politik*, 7(1), 138-159.

<sup>19</sup> Qodir, Z. (2016). Politik Uang Dalam Pemilu-Pemilukada 2014: Modus dan Resolusinya. *Jurnal Ilmiah Administrasi Pemerintahan Daerah*, 8(2).

<sup>20</sup> SALAMIAH, E. Z. (2019). *Peran Ulama Dalam Pragmatisme Politik Pada Pilgub 2018 (Studi Kecamatan Sukobarjo Kabupaten Pringsewu)* (Doctoral dissertation, UIN Raden Intan Lampung).

<sup>21</sup> Op.Cit. Hasil Wawancara dengan Sejumlah Caleg dan Petinggi Partai di Kabupaten Lamongan, Dilakukan pada 20/11/2024.

#### D. Kesimpulan

Demokrasi yang menjadi pilar penting dalam perkembangan dan dinamika politik di Indonesia senyatanya memunculkan isu baru yakni politik pragmatis dan politik transaksional. Ini adalah temuan fakta sosial yang sedang berkembang ditengah mencuatnya isu demokrasi di Indonesia. Maka jelas ada yang tidak beres dalam sistem politik demokrasi di Indonesia. Daerah sebagai salah satu tempat representative dalam demokrasi nasional tidak bisa menghindari dari fakta-fakta sosial tersebut tak terkecuali Kabupaten Lamongan. Untuk bisa menang dan mengamankan satu kursi, dalam pileg tahun 2024 di Kabupaten Lamongan maka caleg harus menyiapkan dana sekitar 1,5 sampai 3 milyar rupiah. Jumlah tersebut tentunya adalah jumlah yang cukup besar. Hal tersebut terjadi tidak pada ruang hampa namun secara sosiologis masyarakat juga menghendaki terjadi politik dengan biaya tinggi tersebut. Akhirnya kondisi semacam ini menciptakan kondisi seperti dua mata pisau yang saling bisa menerkam satu sama lainnya. Maka diperlukan treatment khusus terhadap kondisi sosial semacam ini, bagi penulis perlu adanya kesadaran tinggi bagi masyarakat atau elit politik dalam melihat demokrasi yang tidak hanya persoalan jual-beli.

#### E. Daftar Kepustakaan

- Aw, M. J. (2015). Peranan Partai Politik Dalam Demokrasi di Indonesia. *Jurnal Administrasi Publik*, 6(2).
- Azwar, A. (2014). Kiai, Money Politic dan Pragmatisme Politik dalam Perspektif Siyasa Syar'iyah: Studi Kasus Pilkada Plosorejo Tahun 2013. *IN RIGHT: Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia*, 5(2).
- Budiman, B. N., Putriga, B. R., Safitri, B. D., & Imanuela, V. J. (2022). Populisme: konsekuensi dari stagnasi politik dan demokrasi di Indonesia. *Jurnal PolGov Vol*, 4(1).
- Darmawan, I. (2015). Keterlibatan selebriti dalam pemilu Indonesia pasca Orde Baru. *Sosiohumaniora*, 17(3), 230-236.
- Ekowati, E. Y. (2019). Pragmatisme Politik: Antara Koalisi, Pencalonan, dan Calon Tunggal Dalam Pilkada. *Jurnal Transformative*, 5(1), 16-37.
- Fakhruzy, A. (2020). Mendobrak Kedaulatan Rakyat dalam Sandera Partai Politik. *Jurnal Politikom Indonesiana*, 5(1), 25-36.
- Hakim, A. B., & Sejati, S. P. (2024). POLITIK PEMBANGUNAN DALAM LOGIKA DEMOKRASI REPRESENTATIF:(Studi Kasus Pembangunan di Kabupaten Lamongan). *The Republic: Journal of Constitutional Law*, 2(1), 14-22.
- Jati, W. R. (2022). Perilaku Memilih Rasional dalam Pemilu Indonesia Kontemporer: Perbandingan Pemilu 2014 dan Pemilu 2019. *Jurnal Adhyasta Pemilu*, 5(2), 70-84.
- Lukmajati, D. (2016). Praktek Politik Uang Dalam Pemilu Legislatif 2014 (Studi Kasus di Kabupaten Blora). *Politika: Jurnal Ilmu Politik*, 7(1), 138-159.
- Masrur, M., Purnomo, F., Arviana, S., & Wono, H. Y. (2022). Pragmatisme Partai Nasional Demokrat dalam Sistem Pemilu Terbuka. *JCommsci-Journal Of Media and Communication Science*, 5(1), 41-53.
- Munzir, A. A. (2019). Beragam peran media sosial dalam dunia politik di Indonesia. *JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA (Journal of Governance and Political Social UMA)*, 7(2), 173-182.
- Noor, F. (2016). Perilaku politik pragmatis dalam Kehidupan politik Kontemporer: Kajian atas menyurutnya peran ideologi politik di Era reformasi. *Masyarakat Indonesia*, 40(1), 57-74.
- Qodir, Z. (2016). Politik Uang Dalam Pemilu-Pemilukada 2014: Modus dan Resolusinya. *Jurnal Ilmiah Administrasi Pemerintahan Daerah*, 8(2).

- SALAMIAH, E. Z. (2019). Peran Ulama Dalam Pragmatisme Politik Pada Pilgub 2018 (Studi Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Pringsewu) (Doctoral dissertation, UIN Raden Intan Lampung).
- Sumartono, S. (2018). Budaya Politik Dalam Masyarakat Pragmatis. *LUGAS Jurnal Komunikasi*, 2(1), 20-26.
- Syamsuadi, A., Zamhasari, Z., Hartati, S., & Trisnawati, L. (2020). Pragmatisme Partai Islam: Strategi Politik Terbuka Partai Keadilan Sejahtera dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau Tahun 2018. *JISPO Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 10(1), 1-22.
- Windharti, R., Nurhandjanti, N., & Agung, K. (2021). Pragmatisme Dalam Kandidasi Calon Anggota DPR Partai Nasdem Pada Pemilu 2019. *Journal Publicuho*, 4(2), 738-756.

#### Wawancara

- Hasil Wawancara dengan Sejumlah Caleg dan Petinggi Partai di Kabupaten Lamongan, Dilakukan pada 20/11/2024.
- Hasil Wawancara dengan Sejumlah Pengasuh Pondok Pesantren di Kabupaten Lamongan, Dilakukan pada 23/11/2024.
- Hasil Wawancara dengan Sejumlah Tokoh Masyarakat dan Pemuda di Kabupaten Lamongan, Dilakukan pada 21/11/2024